

PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 2 TAHUN 2026 NOMOR 40 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2026 – PERUBAHAN ATAS

2026

PERBUP KAB BANGKA NO 2, BD 2026/ NO.2 , 7 HLM

PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 40 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2025 tentang APBD 2026, Bupati menetapkan peraturan tentang penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD, guna untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07 /MENKES / 507 / 2024, Tanggal 24 Maret 2024 tentang Data Pusat Kesehatan Masyarakat Teregistrasi Semester II Tahun 2023 yang salah satunya menetapkan Puskesmas Penagan sebagai Puskesmas dengan Karakteristik Kerja Wilayah Terpencil yang berdampak pada kenaikan gaji KPK Nomor: B/ 5690 / KSP.00/ 70-74 /09/2025 tanggal 04 September 2025, Hal penyesuaian Indikator dan Pembobotan Area Indeks Pencegahan Korupsi Daerah *Monitoring Controlling Surveillance for Prevention* (IPKD MSCP) Tahun 2025, dimana dalam surat tersebut mengamatkan agar Pemerintah Daerah melakukan penggeseran objek belanja dan sub kegiatan guna mendukung proses pemenuhan IPKD MSCP, serta hubungan dengan adanya penetapan keadaan darurat bencana di wilayah Kabupaten Bangka, maka perlu dilakukan perubahan Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah ketentuan Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945, UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, UU No. 1 Tahun 2004 Pembendaharaan Negara sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021, UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintrah Pusat dan Daerah, UU No. 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026, PP No. 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, PP No. 23 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, PP No. 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepala Partai Politik, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 1 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, PP No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, PP No. 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan pemerintah No. 18 Tahun 2017, PP No. 32 Tahun 2017 tentang Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengawasan Obat dan Makanan, PP No. 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah, Pepres No. 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional, Pepres No. 118 Tahun 2025 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026, Permendagri No. 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan inventarisasi Pemerintah Daerah, Permendagri No. 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Penggunaan bantuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban dan Operasional, Permendagri No. 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan bantuan keuangan Partai Politik, Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri No. 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan dan Belanja Daerah, Rancangan, Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Permendagri No. 14 Tahun 2025 Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, Perda Kab Bangka No. 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bangka, Perda Kab Bangka No. 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Perda Kab Bangka No. 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, Perbup Bangka No. 40 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

- Dalam peraturan ini diatur tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2025, uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

CATATAN: - Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan dan ditetapkan pada tanggal 19 Februari 2026.

- Lampiran: -